

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan adalah salah satu faktor penting yang berperan dalam menentukan kemajuan suatu negara. Sebagaimana disampaikan oleh Pitriyati dkk. (2023: hlm. 88), kemajuan suatu negara sangat dipengaruhi oleh kualitas pendidikannya. Pendidikan yang berkualitas mampu mencetak sumber daya manusia yang unggul dan kompeten. Hal ini juga sejalan dengan pendapat Sitompul dkk. (2023: hlm. 11), yang menyatakan bahwa pendidikan merupakan salah satu kunci utama bagi kemajuan negara. Pelaksanaan pendidikan yang menghasilkan sumber daya manusia berkualitas dapat memberikan dampak positif, khususnya dalam mendukung pembangunan bangsa. Sumber daya manusia yang berkualitas akan berkontribusi aktif dalam memperbaiki kondisi kehidupan dan turut serta menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh negara.

Salah satu langkah yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara maju adalah dengan menjamin akses layanan pendidikan bagi seluruh warganya. Jaminan ini telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, khususnya pada Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Hal ini mencerminkan komitmen negara untuk memastikan bahwa pendidikan dapat diakses secara merata oleh seluruh rakyat Indonesia, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau wilayah tempat tinggal.

Namun, berdasarkan fakta di lapangan tidak semua warga negara Indonesia dapat sepenuhnya mengakses layanan pendidikan yang dijanjikan oleh pemerintah. Beberapa faktor yang menyebabkan hal ini antara lain adalah distribusi lembaga pendidikan yang tidak merata, lokasi yang sulit dijangkau, dan keterbatasan ekonomi keluarga yang berdampak pada keputusan individu untuk mengikuti layanan pendidikan yang tersedia.

Menurut data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada 24 November 2023 dalam laporan "Statistik Pendidikan 2023," angka putus sekolah (APS)

Adyla Yuliandawati, 2025

PERSEPSI DIRI KADER PKK DALAM MENGIKUTI PROGRAM KESETARAAN PAKET C DI PKBM BHINA SWAKARYA BATUJAJAR

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

cenderung meningkat seiring dengan naiknya jenjang pendidikan. Hal ini terlihat dari data Susenas yang menunjukkan APS pada jenjang SMA/ sederajat sebesar 1,03%, SMP/ sederajat 0,98%, dan SD/ sederajat hanya 0,11%.

Terdapat pula kesenjangan APS berdasarkan tipe daerah, dengan angka putus sekolah di pedesaan lebih tinggi dibandingkan di perkotaan. Sebagai contoh, pada jenjang SD/ sederajat, APS di pedesaan mencapai 0,19%, sementara di perkotaan hanya 0,05%. Pada jenjang SMA/ sederajat, APS di pedesaan mencapai 1,25%, sedangkan di perkotaan sebesar 0,78%. Hal ini menunjukkan bahwa akses terhadap lembaga pendidikan lebih mudah di daerah perkotaan dibandingkan di pedesaan.

Putri dan Muslim (2024: hlm. 7-8) menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi angka partisipasi sekolah di Indonesia. Hasil analisis regresi menunjukkan adanya hubungan negatif antara tingkat ekonomi masyarakat yang rendah dengan angka partisipasi sekolah (APS). Artinya, peningkatan jumlah penduduk miskin dapat menyebabkan penurunan angka partisipasi sekolah. Dengan demikian, rendahnya APS di Indonesia dapat dikaitkan dengan kondisi ekonomi masyarakat yang kurang mendukung.

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah menyediakan layanan pendidikan nonformal sebagai alternatif bagi masyarakat yang tidak dapat mengakses pendidikan formal. Hal ini diatur dalam Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menyatakan bahwa pendidikan nonformal diselenggarakan untuk masyarakat yang membutuhkan layanan pendidikan sebagai pengganti, pelengkap, atau tambahan pendidikan formal, guna mendukung konsep pendidikan sepanjang hayat.

Selain itu, hasil dari pendidikan nonformal dapat diakui setara dengan pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan sesuai dengan Pasal 26 Ayat (6) undang-undang yang sama. Pemerintah juga menyelenggarakan program pendidikan kesetaraan, salah satu layanan pendidikan nonformal, untuk memberikan peluang belajar kepada mereka yang tidak dapat mengakses pendidikan formal. Program ini bertujuan memberikan kesempatan pendidikan

yang setara, sekaligus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat guna memperbaiki kualitas hidup mereka.

Pendidikan kesetaraan diselenggarakan melalui lembaga nonformal seperti PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat), LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), SKB (Sanggar Kegiatan Belajar), serta lembaga lain yang diakui pemerintah. Program ini memiliki karakteristik khusus seperti pelaksanaan yang fleksibel, dapat dilakukan kapan dan di mana saja, cakupan usia peserta yang luas, serta penyediaan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan warga belajar. Susanti dkk. (2024: hlm. 288) menyatakan bahwa layanan pendidikan nonformal dirancang untuk menjangkau masyarakat yang tidak terlayani oleh pendidikan formal, dengan pendekatan yang lebih fleksibel dan sesuai dengan konteks kehidupan masing-masing individu.

Pada program pendidikan kesetaraan, batasan maksimal warga belajar memiliki rentang usia yang lebih luas pada pendidikan formal. Pada program kesetaraan Paket C, menurut Baifas (dalam Astuti P. dan Rochana T., 2020: hlm. 948), salah satu kriteria sasaran pada program kesetaraan adalah penduduk dengan rentang usia 15-44 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar. Oleh karena itu, siapapun dan apapun profesinya, masyarakat yang memiliki rentang usia antara 15-44 tahun dan belum menuntaskan wajib belajarnya, serta memiliki keinginan untuk melanjutkan pendidikannya berhak mendapatkan dan mengikuti kegiatan pembelajaran pada program kesetaraan, termasuk Kader PKK,

Dalam lingkungan masyarakat, kader pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) memiliki peran yang penting untuk membantu pemerintah daerah dan pusat untuk membangun kesejahteraan keluarga dan pemberdayaan wanita. Oleh karena itu, untuk membantu mewujudkan tujuan dan program yang telah dirancang oleh pemerintah, kader PKK tentunya harus terpelajar dan memiliki kemampuan dan keterampilan yang lebih daripada masyarakat biasanya. Pengetahuan dan keterampilan tersebut dapat digunakan untuk mendukung kader PKK dalam melaksanakan program-program PKK. Kader PKK yang mengikuti kegiatan pembelajaran pada program kesetaraan menunjukkan masih adanya eksistensi pendidikan pada orang dewasa.

Keikutsertaan kader PKK dalam program kesetaraan merupakan salah satu bagian dari pembelajaran atau pendidikan orang dewasa. Perbedaan dalam pendidikan orang dewasa tidak hanya terkait dengan faktor usia, tetapi juga mencakup aspek seperti konsep diri, pengalaman yang dimiliki, serta tindakan yang diambil dalam proses pengambilan keputusan sebagai wujud kemandirian dan tanggung jawab pribadi. Sebab, menurut Setiawati, R. I., dan Shofwan, I. (2023: hlm. 3), pendidikan orang dewasa merupakan sebuah kegiatan pembelajaran yang akan terus berlangsung selama kehidupannya dan menempatkan mereka sebagai seseorang yang mampu bertanggung jawab dan menentukan jalan hidupnya secara mandiri. Selain itu, menurut Puspita, R. D. dan Laksono, B. A., (2023: hlm. 6) bahwasanya orang dewasa sudah memiliki pola pikir yang matang, sehingga mereka mampu bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Bertanggung jawab untuk menentukan tujuan hidupnya, mengetahui jelas kebutuhannya, serta mampu mengambil keputusan dan menyelesaikan masalahnya secara mandiri, tidak bergantung pada orang lain.

Menurut Sudarwan Danim (dalam Darmawan D., 2023: hlm. 105) bahwasannya perbedaan utama dalam pendidikan orang dewasa tidak hanya terletak pada usia, tetapi juga melibatkan kemampuan untuk menilai, merencanakan, dan menentukan kegiatan belajar secara mandiri. Orang dewasa cenderung memanfaatkan kesalahan sebagai pembelajaran berdasarkan pengalaman hidup. Selain itu, mereka lebih menyukai materi pembelajaran yang relevan dengan kehidupan sehari-hari atau pekerjaan dan fokus pada penyelesaian masalah dalam proses belajarnya.

Kesulitan masyarakat dalam mengakses layanan pendidikan formal yaitu sulitnya akses yang ditempuh serta kondisi ekonomi yang tidak mendukung masyarakat untuk dapat mengikuti kegiatan pembelajaran. Kondisi tersebut juga dirasakan oleh masyarakat di sekitar PKBM Bhina Swakarya. Berdasarkan hasil studi lapangan, ditemukan berbagai temuan mengenai latar belakang keikutsertaan masyarakat pada kegiatan pembelajaran di PKBM Bhina Swakarya. Berdasarkan hasil temuan, kondisi ekonomi yang rendah menjadi isu paling banyak dirasakan oleh warga belajar, selain itu sebagian warga belajar yang sudah memiliki pekerjaan membuat mereka tidak memungkinkan mereka untuk mengikuti

pembelajaran pada pendidikan formal, salah satunya yaitu tim penggerak atau kader PKK.

Tim penggerak atau kader PKK merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki peran dalam membangun pengembangan diri dan pemberdayaan di masyarakat. Tentunya untuk menciptakan kondisi tersebut, kader PKK harus memiliki keterampilan dan kompetensi untuk melakukan berbagai program yang akan dilaksanakan di masyarakat. Oleh karena itu, untuk menilai apakah kader PKK sudah memiliki kompetensi tersebut, dapat dilihat berdasarkan pada pendidikan yang diakses oleh kader PKK. Setidaknya, kader PKK sudah mengikuti program wajib belajar 12 tahun yang sedang digalakan oleh pemerintah.

Berdasarkan hasil pendahuluan yang telah dilakukan, warga belajar kader PKK yang mengikuti program kesetaraan di PKBM Bhina Swakarya memiliki tingkat pendidikan terakhir pada jenjang SD dan SMP. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kontribusi kader PKK dalam mengikuti program wajib belajar 12 tahun masih rendah. Oleh karena itu, usaha yang dilakukan oleh kader PKK untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan yang dapat digunakan sebagai bentuk kontribusinya pada masyarakat melalui program-program pokok PKK yaitu dengan mengikuti program kesetaraan yang ada di PKBM Bhina Swakarya sesuai dengan tingkat pendidikan terakhir yang telah ditempuh.

Persepsi diri dapat berperan terhadap keberhasilan seseorang dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Hal tersebut dapat terjadi karena persepsi diri dapat mempengaruhi tingkah laku dan tindakan seseorang (Isthofiyani dkk, 2016: hlm. 12). Persepsi adalah sebuah proses interpretasi terhadap suatu stimulus yang diperoleh berdasarkan penginderaan yang menghasilkan sebuah penilaian dan pemahaman makna terhadap objek yang diamatinya (Soraya N., 2018: hlm. 188). Dengan demikian, persepsi diri merupakan sebuah proses penilaian, pemaknaan dan pandangan terhadap diri melalui proses interpretasi data dan informasi serta stimulus yang diperoleh oleh alat indera. Pembentukan persepsi dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Beberapa aspek yang terdapat pada faktor internal dalam pembentukan persepsi yaitu seperti, alat indera yang dimiliki

manusia pada umumnya yaitu seperti mata, hidung, lidah, telinga dan kulit sebagai faktor fisiologis dan motivasi serta pengalaman belajar sebagai faktor psikologis (Yazid, T. P. dan Ridwan, R., 2017: hlm.197).

Pada faktor psikologis, pengalaman belajar yang dimiliki seseorang dapat membentuk efikasi diri. Menurut Srimulyani dan Hermanto (dalam Sanjaya S, dan Handoyo S. E., 2024: hlm. 474), efikasi diri merupakan kemampuan seseorang dalam mengevaluasi kemampuannya sehingga ia dapat mengatur dan mengukur kemampuannya untuk melakukan tindakan yang akan dilakukan. Menurut Septiara dan Listiadi (2019: hlm. 315), efikasi diri seseorang dapat terbentuk karena adanya pengaruh dari pengalaman. Adapun jenis pengalaman yang dapat mempengaruhi efikasi diri seseorang yaitu, pengalaman akan keberhasilan dan atau kegagalan. Semakin seseorang memiliki keberhasilan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, maka efikasi diri yang dimiliki akan semakin meningkat. Namun sebaliknya, apabila seseorang sering mendapatkan pengalaman akan kegagalan, ia cenderung memiliki efikasi diri yang rendah dan sulit untuk melakukan percobaan selanjutnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Lestari, A. dkk. (2024: hlm. 74) mengungkapkan bahwa tindakan seseorang dipengaruhi oleh faktor pengetahuan, pengalaman, dan motivasi. Melalui kombinasi ketiga faktor tersebut, individu dapat memahami manfaat serta tujuan dari tindakan yang dilakukan. Motivasi dan efikasi diri juga memiliki peran penting dalam memengaruhi perilaku seseorang dan berkontribusi pada peningkatan hasil belajar. Hal ini diperkuat oleh penelitian Monika, M., dan Adman, A. (2017: hlm. 225), yang menunjukkan adanya pengaruh signifikan baik secara parsial maupun simultan dari motivasi belajar dan efikasi diri terhadap hasil belajar siswa. Penelitian lain oleh Marthadiningrum D. A. dan Widayati, I. (2022: hlm. 173) menambahkan bahwa motivasi belajar dan efikasi diri turut berkontribusi secara parsial terhadap pengembangan kemandirian belajar. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi motivasi dan efikasi diri yang dimiliki seseorang, semakin besar pula kemandirian serta hasil belajar yang dapat dicapai.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti bermaksud untuk mengetahui bagaimana persepsi kader PKK dalam mengikuti kegiatan pembelajaran pada program kesetaraan Paket C. Mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai motivasi dan efikasi diri yang dimiliki, sebab sebelum mengikuti kegiatan pembelajaran pada program kesetaraan Paket C mereka sudah memiliki peran dan identitas tersendiri di masyarakat. Kemudian bagaimana pengaruh motivasi dan efikasi diri pada kegiatan pembelajaran terhadap perubahan yang dirasakan oleh warga belajar kader PKK setelah mengikuti kegiatan pembelajaran pada program kesetaraan Paket C.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, identifikasi masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Warga belajar kader PKK yang mengikuti program kesetaraan berasal dari berbagai desa, meliputi desa Giriasih, Cangkorah dan Pangauban.
2. Pada tahun 2024, kader PKK yang mengikuti program kesetaraan di PKBM Bhina Swakarya berjumlah 75 orang. Masing-masing desa, mengikutsertakan 25 orang kader PKK untuk mengikuti program kesetaraan sesuai tingkat pendidikan akhirnya.
3. Kader PKK seringkali mengalami kesulitan dalam mengelola konsistensi kehadiran, hal tersebut seringkali diakibatkan oleh agenda lain yang berbenturan, jarak tempuh menuju lokasi pembelajaran dan sarana belajar.
4. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dilakukan satu minggu sekali. PKBM Bhina Swakarya memiliki dua lokasi pembelajaran yang bisa dikunjungi oleh warga belajar, disesuaikan dengan kedekatan jarak tempu dari domisili ke lokasi pembelajaran. Lokasi utama PKBM Bhina Swakarya ada di Batujajar dan lokasi yang kedua ada di wilayah Seketando.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dideskripsikan, peneliti merumuskan masalah penelitian, yaitu “Bagaimana persepsi diri kader PKK dalam mengikuti program kesetaraan Paket C di PKBM Bhina Swakarya Batujajar?”.

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, pertanyaan penelitian dapat dirumsukan sebagai berikut:

1. Apakah motivasi yang mendorong kader PKK dalam mengikuti program pendidikan kesetaraan?
2. Bagaimana efikasi diri kader PKK dalam mengikuti kegiatan pembelajaran pada program pendidikan kesetaraan?
3. Bagaimana dampak perubahan yang dirasakan oleh kader PKK setelah mengikuti kegiatan pembelajaran pada program pendidikan kesetaraan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan persepsi diri kader PKK dalam mengikuti program kesetaraan Paket C di PKBM Bhina Swakarya Batujajar, dengan tujuan khusus sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan motivasi kader PKK dalam mengikuti program pendidikan kesetaraan.
2. Untuk mendeskripsikan efikasi diri kader PKK dalam mengikuti kegiatan pembelajaran pada program pendidikan kesetaraan.
3. Untuk mendeskripsikan dampak perubahan yang dirasakan oleh kader PKK setelah mengikuti kegiatan pembelajaran pada program pendidikan kesetaraan.

1.4 Manfaat Penelitian

Berikut adalah hasil yang diharapkan oleh peneliti dari penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat menambahkan khasanah dan memberikan kontribusi keilmuan mengenai aspek persepsi terhadap penyelenggaraan program pendidikan nonformal informal khususnya mengenai pendidikan kesetaraan. Selain itu, hasil penelitian dapat digunakan sebagai sumber rujukan tambahan bagi peneliti yang memiliki ketertarikan pada fokus kajian yang sama.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti
 - 1) Digunakan sebagai upaya meningkatkan pengetahuan pendidikan nonformal melalui program pendidikan kesetaraan.
 - 2) Sebagai sarana pembelajaran yang berguna untuk menambah pengalaman peneliti.
 - 3) Menambah wawasan mengenai karakteristik warga belajar pada program pendidikan kesetaraan
- b. Bagi Pengembangan Pendidikan Masyarakat
 - 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mengenai pendidikan masyarakat, khususnya mengenai karakteristik warga belajar pada program kesetaraan di lembaga pendidikan nonformal. Dengan demikian, penelitian ini dapat memperkaya wawasan terkait kebutuhan, tantangan, dan potensi yang dimiliki oleh peserta program kesetaraan, serta memberikan informasi yang berguna untuk pengembangan dan perbaikan layanan pendidikan nonformal yang lebih efektif dan inklusif.

1.5 Struktur Organisasi Skripsi

Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam penulisan dan penyelesaian skripsi ini disesuaikan dengan Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UPI Tahun 2021 pada “Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Nomor 7867/UN40/HK/2021”. Adapun struktur penulisan skripsi sebagai berikut:

1. BAB I: Pendahuluan

Bagian ini berfungsi sebagai pengantar awal yang memperkenalkan isu atau topik yang akan dibahas dalam penelitian. Bagian ini mencakup latar belakang penelitian yang memberikan konteks jelas mengenai permasalahan yang diteliti, disertai dengan rumusan masalah penelitian yang menjadi fokus utama penelitian. Selain itu, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, dan struktur organisasi penelitian juga diuraikan untuk memberikan panduan yang terstruktur kepada pembaca mengenai arah penelitian.

2. BAB II: Kajian Pustaka

Dalam bagian ini, peneliti menyajikan konsep, teori, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang sedang diteliti. Isi ini bersifat deskriptif dan mengutamakan sumber rujukan terkini guna memperkaya pemahaman yang mendalam terhadap permasalahan yang diteliti.

3. BAB III: Metode Penelitian

Bagian ini juga bersifat prosedural, di mana peneliti memberikan gambaran mengenai pendekatan penelitian yang digunakan, instrumen penelitian yang diterapkan, serta tahapan pengumpulan data yang dilakukan. Langkah-langkah yang diambil untuk menganalisis data juga dijelaskan secara rinci untuk memberikan kejelasan metodologis kepada pembaca.

4. BAB IV: Temuan dan Pembahasan

Pada bagian ini terdapat pembahasan dua topik utama, yaitu (1) merupakan temuan penelitian yang diperoleh dari hasil pengolahan dan analisis data yang telah dilakukan dalam berbagai bentuk sesuai dengan urutan rumusan masalah penelitian dan (2) pertanyaan penelitian yang sudah dirumuskan sebelumnya dapat dijawab melalui pembahasan terhadap hasil temuan penelitian.

5. BAB V: Simpulan, Implikasi dan Rekomendasi

Bagian ini menyajikan kesimpulan, implikasi, dan rekomendasi. Peneliti menafsirkan hasil analisis temuan penelitian, serta menjelaskan apa saja yang dapat diperoleh dan dimanfaatkan dari hasil penelitian tersebut, memberikan wawasan yang lebih mendalam bagi pengembangan lebih lanjut.